



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini, . Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Desember 2024
KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM



Ir. BENNY SAKTI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
I Pendahuluan	1
II Pelaksanaan Kegiatan	2
A Mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan Sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk intensif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024	4
B Mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM	8
C Mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI	13
D Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Dalam Negeri	16
E Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	22
F Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029	31
G Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/kota	40
H Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	49
I Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024	55
Lampiran matrik monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ke Kabupaten/Kota	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Provinsi Sumatera Barat masih memiliki PR (Pekerjaan Rumah) yang sangat sulit dalam pencapaian target 0 % penurunan kemiskinan ekstrem walaupun di tahun 2023 sudah 6 daerah kab/kota yang mencapai 0% karena ditimpa bencana alam musibah dari letusan Gunung Berapi (Desember 2023) berdampak pada 3 Kab/Kota, Banjir Bandang (Maret 2024) berdampak hampir di 19 kab/kota dan di bulan Mei 2024 kembali banjir Bandang dan Lahar Dingin yang menimpa 5 Kab/Kota. Bencana tersebut merusak kawasan-kawasan sentra pertanian, merusak infrastruktur pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan nilai kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi mencapai Rp. 1,6 T belum lagi yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat, kabupaten/kota serta permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Bencana ini menyebabkan angka kemiskinan sedikit naik dari kondisi 2023. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan berdasarkan data dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sudah ada 6 Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem 0 % yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto. Secara statistik kami memiliki keyakinan bahwa target 0 % ini akan dapat disusul juga oleh Kab/Kota lain karena sudah berjalannya kolaborasi dan koordinasi TKPK Provinsi dengan TKPK Kab/Kota dalam intervensi program/kegiatan pengentasan kemiskinan namun di luar prediksi kita faktor alam ternyata merubah kondisi tersebut.

Dengan komitmen bekerja dengan hati, hati-hati dan sepenuh hati dalam melakukan koordinasi dan kolaboratif dengan semua pihak agar kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dapat diturunkan kembali, diakini angka kemiskinan ekstrem segera akan dapat ditekan kembali karena adanya dukungan kebijakan imperatif dalam penurunan kemiskinan dalam dokumen perencanaan jangka panjang di daerah tahun 2025-2045 dalam rangka menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu 3 strategi upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat akan terus dilakukan secara kolaboratif yaitu strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Secara singkat kondisi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung menurun. Pada kondisi bulan Maret tahun 2019 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,42% dan pada kondisi Maret tahun 2024 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 5,97 % atau sebanyak 345.730 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikonsumsi oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan rumah tangga merupakan hasil perkalian GK per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Pada Maret 2024, secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga miskin di Sumatera Barat pada periode Maret 2024 adalah sebesar Rp3.924.625,- per rumah tangga miskin per bulan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024. Kab.

Kepulauan Mentawai dinyatakan termasuk dalam daerah kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dan kemudian untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah target pengetasan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena itu kami berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini secara berkala (3 bulan sekali) melalui Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa kewajiban pelaporan ini juga merupakan bagian dari faktor yang dinilai untuk penentuan alokasi insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Meningkatkan berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk diintervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan komitmen bersama kemiskinan dapat diturunkan dan diatasi. Komitmen untuk pengentasan kemiskinan perlu dilakukan bersama karena kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar dan secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, air bersih) dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan

penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :

- a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/ kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
 - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.
3. Dapat digunakan secara bersama data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Sumber Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu data yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan yang memuat rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (by name by address) yang ke depan akan disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE.

II. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat diakomodir pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam, dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

A. Mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan Sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk intensif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 tanggal 25 s/d 26 Maret di Jakarta

Dasar :

1. Nota Dinas Kepala Bappeda Sumbar Nomor 050/11/ND/Eko-SDA/Bappeda/III-2024 tanggal 22 Maret 2024, perihal Izin Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk intensif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 di Jakarta
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094.2/87/Eko-SDA/Bappeda/3-2024 tanggal 25 Maret 2024.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk memberikan pemahaman kepada daerah dalam menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penilaian penghapusan kemiskinan eskترم.

2. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM

Waktu Pelaksanaan : 25 S/D 26 Maret 2024

Rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 disampaikan oleh 6 narasumber dengan topik sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri).
2. Praktik Baik Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur (Ir. Mohammad Yasin M.Si - Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur).
3. Target dan Capaian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Dr. Adywarman, S.I.P., M.D.M - Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden).
4. Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan).
5. Dukungan Transfer Ke Daerah Untuk Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Esktrek (Kementerian Keuangan RI).
6. Strategi Perlindungan Sosial Periode 2025-2029 dan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Tb. Achmad Choesni - Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Provinsi Jawa Timur diundang sebagai narasumber dan berbagi pengalaman karena pada tahun 2023 berhasil memenuhi kriteria mendapatkan dana insentif fiskal dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan itu di samping tercepat dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional juga karena melakukan beberapa inovasi secara terpadu baik melalui aplikasi SINTA GELIS (<https://sintagelis.jatimprov.go.id/>) sedangkan untuk program inovasinya adalah :

PROGRAM ICON KEMISKINAN EKSTREM 2024

Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan
KANTITAS (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS) Dinas Pendidikan	PEMBERDAYAAN DAN KLINIK BUMDESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
PEMBIAYAAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN (BIAKESMASKIN) Dinas Kesehatan	JATIM PUSPA (PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM RUTILAHU DPRKPKC, DKP
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PLUS DINAS SOSIAL	PROKESRA Dinas Koperasi UKM	INFRASTRUKTUR DASAR DAN PROGRAM LISTRIK RUMAH PRO RAKYAT/ ENERGI ALTERNATIF Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Bansos Kemiskinan Ekstrem Dinas Sosial	(PETA KINH BERKEMANTRA) PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI, KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN SELAJUTERA DPRK, DISBUN, DKP, DISHUT, DISPERINDAG, DISNAK	
PERI PENJAJA TRU (PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN ISKAM MASJID dan HUYUAD, BEKASNYA GURU MADRASAH DINIYAH, DAN PENJAJA MAKAM SITUS Bire Kesra	PEMBENTUKAN MJC (MILLENNIAL JOB CENTER) DAN EJSC (EAST JAVA SUPER CORRIDOR), PELATIHAN KERJA dan JOB FAIR DISNAKER, DPMPTSP, DINAS KOPERASI	

Penyampaian materi dan diskusi penting untuk tindak-lanjuti oleh daerah adalah :

Target Kemiskinan dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJPN 2025 - 2045

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sasaran Utama: Tl. Kemiskinan

2025: 7,0-8,0 % 2029: 4,5-5,0 % 2045: 0,5-0,8 %

Isu dan Indikator Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	%/L Pengampu
9. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	0	1	Bappenas
10. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	62,48	Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan
11. Presentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	28	Kementerian Ketenagakerjaan

- Fokus pemerintah pada RPJMN 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan nasional. Kemiskinan ekstrem di tahun 2024 diperkirakan tercapai sesuai target RKP 2024: 0-1 persen.
- Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah mencapai target penurunan kemiskinan nasional.

Beberapa Intervensi yang menjadi Penekanan

- Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
- Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan ekonomi perawat (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
- Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Insentif Fiskal TA 2023

Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu kategori kinerja yang dinilai dalam pengalokasian Insentif Fiskal ke daerah atas kinerja tahun berjalan TA 2023.

Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN TA 2023

Rp4,0 T

Tata cara pengalokasian diatur dalam PMK 208 tahun 2022

Rp3,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Berkemajuan Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri tahun 2022

Rp1,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Tertinggal yang Berkemajuan Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK 209 tahun 2022

Rp4,0 T

Tata cara pengalokasian diatur dalam PMK 67 dan PMK 97 tahun 2023

Rp1,0 T

Penilaian Kinerja tahun berjalan Kategori Pengendalian Inflasi

Periode I Rp100 M Periode II Rp300 M Periode III Rp600 M

Rp100 M tahun 2023 Rp300 M tahun 2023 Rp600 M tahun 2023

Tahun I: 100, 200, 300 Tahun II: 100, 200, 300 Tahun III: 100, 200, 300

Rp3,0 T

Penilaian Kinerja tahun berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(Pemerataan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengurangan PDR, dan peningkatan belanja daerah)

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK 330 tahun 2023

Tahun I: 100, 200, 300 Tahun II: 100, 200, 300 Tahun III: 100, 200, 300

Ketentuan Penyakaran

Tahap I
50% Paling Cepat : September Tanpa syarat sasar

Tahap II
50% Penyerapan:
A. Rencana Penganggaran II kategori kesejahteraan masyarakat (K.M.K.) dan
B. Laporan Realisasi Penganggaran dan Tahap II dengan serapan minimal 50% (syarat sasar diutamakan max. 10 Nov 2023)

Ketentuan Penggunaan

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:

- Pengendalian inflasi;
- Penurunan stunting;
- Peningkatan investasi; dan
- Penurunan kemiskinan.

6

Arah Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024



Proporsi alokasi melanjutkan kebijakan di 2023 dimana alokasi atas **kinerja tahun Sebelumnya** dan **kinerja tahun Berjalan** dialokasikan sama, yaitu sebesar Rp4,0 T dalam upaya mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Terkait Penanganan Kemiskinan Dalam Pengalokasian IF



	IF TA 2024 Kinerja Tahun Sebelumnya	IF TA 2024 Kinerja Tahun Berjalan	IF TA 2023 Kinerja Tahun Berjalan
Indikator yang digunakan	Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan SK TKPK Penetapan RAT tahun 2024 SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah Lampiran SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah atau Data Verval P3KE Pelaporan PPKE TW I dan TW II 2024 Realisasi belanja tagging kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan SK TKPK Penetapan RPKD SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah Lampiran SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah atau Data Verval P3KE Pelaporan PPKE TW I dan TW II 2023 Realisasi belanja tagging kemiskinan ekstrem
Periode data	2021 - 2022	Januari – Juni 2024	Januari – Juni 2023
Sumber data	BPS	Kemendagri, TNP2K, KemenkoPMK, Kemenkeu	Kemendagri, TNP2K, KemenkoPMK, Kemenkeu

Permasalahan :

- Masih ada data P3KE belum diverifikasi dan validasi oleh daerah.
- Masih ada laporan realisasi program/kegiatan dan realisasi anggaran belum dilaporkan per triwulan oleh daerah melalui website Kemenko PMK.
- SK TKPK masih ada yang belum diperbaharui oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Pemecahan Masalah :

- Memastikan ketersediaan data sudah digali dan diverifikasi oleh TKPKD kembali sehingga data exclusion error dan inclusion error dapat diminimalisir.
- Mempedomani kembali Keputusan Menteri Keuangan terhadap persyaratan dalam pemberian insentif fiskal bagi daerah

Kesimpulan :

Percepatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan upaya pemerintah dalam (1) meningkatkan kualitas implementasi program dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan: (2) ketepatan sasaran program dan (3) intervensi khusus di wilayah kantong kemiskinan.

Saran :

1. Pemerintah daerah memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
2. Data P3KE digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.
3. Mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara pentahelix (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Media Masa, Swasta/dunia usaha di sektor-sektor potensial untuk dikembangkan.



B. Mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM di Provinsi Jakarta.

Dasar :

1. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/228/ND/Set/Bappeda/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024, perihal Izin Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM di Provinsi Jakarta.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094.3/ VIII/SPT/LD/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 2 Agustus 2024.

Maksud dan Tujuan :

Maksud :

Rakor Kemiskinan Ekstrem

Untuk memperkuat sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam upaya PPKE.

Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM

Untuk meminta dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi biru di WPP 572 melalui Program Blue Halo S BEAM.

Tujuan mengikuti Bimbingan Teknis ini adalah :

Rakor Kemiskinan Ekstrem

1. Melakukan evaluasi dan penguatan program dan kebijakan yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya di lapangan.

2. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai target nasional.
3. Meningkatkan ketepatan pensasaran program melalui penggunaan data P3KE yang terus dimutakhirkan dan penyesuaian regulasi yang mendukung prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.

Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM

Agar Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi ekonomi biru untuk merespon dampak perubahan iklim di WPP 572 yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan merupakan habitat penting bagi biota laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM.

Waktu Pelaksanaan : 4 - 7 Agustus 2024

1. Rakor Kemiskinan Ekstrem :

- a. Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dilaksanakan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Inspres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Rapat dihadiri dan dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan narasumber dari : Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- c. Dari Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bappeda dan Dinas Sosial. Gubernur juga mempresentasikan capaian dan perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi	Mar'23	Mar'24	Provinsi	Mar'23	Maret'24
Aceh	1,83	0,95	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Sumatera Utara	0,78	0,54	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Sumatera Barat	0,41	0,57	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Riau	0,67	0,43	Kalimantan Timur	0,10*	0,27
Jambi	0,81	0,41	Kalimantan Utara	0,34*	0,44
Sumatera Selatan	1,29	0,59	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Bengkulu	2,08	0,69	Sulawesi Tengah	1,44	1,27
Lampung	1,32	0,90	Sulawesi Selatan	1,01	0,70
Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29	Sulawesi Tenggara	1,65	1,06
Kepulauan Riau	0,35	0,23	Gorontalo	2,44	1,46
DKI Jakarta	0,57	0,35	Sulawesi Barat	0,75	1,46
Jawa Barat	0,79	0,78	Maluku	2,59	1,98
Jawa Tengah	1,11	0,89	Maluku Utara	0,67	0,52
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Papua Barat	6,43	4,45
Jawa Timur	0,82	0,66	Papua	7,67	5,59
Banten	1,12	0,62	Papua Barat Daya	-	5,25
Bali	0,19	0,23	Papua Selatan	-	3,60
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Papua Tengah	-	6,09
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Papua Pegunungan	-	4,01

- d. Arahan Menko PMK menyampaikan bahwa daerah provinsi perlu memperkuat program/kegiatan kemiskinan melalui 3 strategi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- e. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa bagi daerah yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan berpeluang untuk mendapatkan insentif fiskal jika dapat menunjukkan kinerja dalam :
 1. Kepatuhan Pemda dalam Pemanfaatan dan Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
 2. Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
 3. Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023 dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.



2. Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM

- a. Rakor Pembahasan Co-Financing ini diprakarsai oleh Kemenko Maritim dan Investasi karena telah disetujuinya oleh Green Climate Fund (GCF) sebagai pemberi dana hibah untuk program pembangunan yang berkelanjutan (ekonomi biru, ketahanan iklim dan lingkungan yang berkelanjutan) di Indonesia, terutama di WPP 572 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten)

Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)



Blue Halo S merupakan inisiatif bersama Pemerintah Indonesia (Kemenko Marves dan KKP), Konservasi Indonesia (KI), Conservation International (CI), dan bantuan pendanaan Green Climate Fund (GCF).

Blue Halo S masih dalam tahap persiapan proyek (PPF – *Project Preparation Facility*) yang rencananya akan diimplementasikan selama 6 tahun (2025-2031) di WPP 572 mencakup 6 provinsi: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.

Blue Halo S sudah mendapatkan surat tidak keberatan (NOL – *No Objection Letter*) dari NDA (BKF Kemenkeu)



- b. Agar pembiayaan oleh GCF dapat direalisasikan maka daerah pada WPP 572 perlu mendukung terhadap program/kegiatan yang didanai melalui co-financing baik melalui APBN, APBD maupun dana pihak ketiga.
- c. Desain penggunaan fasilitas hibah oleh GCF digunakan untuk mendanai :



- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun usulan kegiatan co-financing baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Permasalahan :

Rakor Kemiskinan Ekstrem :

Walaupun hampir semua Provinsi mengalami penurunan angka kemiskinan dan .kemiskinan ekstrem namun Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan pada tahun 2023. Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan karena tertimpa

bencana alam berupa erupsi gunung merapi dan banjir bandang di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM :

Usulan oleh Provinsi Sumatera Barat perlu ditelaah lagi karena baru mengusulkan rencana pembiayaan melalui APBD Provinsi saja, sementara berpeluang juga untuk diusulkan kegiatan terkait penanganan kawasan mangrove di pantai oleh Dinas Kehutanan dan penciptaan kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pemecahan Masalah :

- a. Pemerintah Provinsi melalui TKPKD diharapkan agar dapat mengawal terus penurunan kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat dicapai 0 % namun jika tidak tercapai akan dibahas dan diprioritaskan untuk pencapaiannya di program kerja Presiden terpilih Tahun 2025-2029 dengan memperkuat 3 strategi penurunan kemiskinan.
- b. Akan dilaksanakan rapat di masing-masing provinsi untuk mempertajam usulan program/kegiatan melalui co-financing dengan instansi terkait.

Kesimpulan

Rapat Koordinasi Kemiskinan dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing adalah dalam rangka mensinergikan kebijakan dan target nasional yang akan didukung oleh Pemerintah Daerah.

Saran

Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan percepatan pengusulan proposal dana hibah, Provinsi Sumatera Barat akan memperkuat output dan outcome program yang telah disusun sehingga sinergi dengan program/kegiatan Pemerintah Pusat.



C. Mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI tanggal 17-20 September 2024 di Bogor.

Dasar :

1. Surat Country Lead BRAC Internasional Nomor 02.002/BRAC/IX/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Undangan Menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Sumatera Barat Nomor 050/321/ND/Set/Bappeda/9/2024 tanggal 12 September 2024.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Sumatera Barat Nomor 094.2/113/SPT/Eko-SDA/IX/Bappeda-2024 tanggal 17 September 2024.

Maksud dan Tujuan :

1. Maksud :
Untuk memastikan implementasi program INTEGRASI selaras dengan rencana kerja strategis pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah dan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait.
2. Tujuan :
 - a. mendiskusikan dan menyusun kesepakatan bersama tentang hasil-hasil yang diharapkan, serta peran dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah), serta BRAC International dalam pelaksanaan program INTEGRASI;
 - b. melakukan tinjauan strategis terhadap draf Rencana Kerja program INTEGRASI (termasuk rincian rencana aksi dan jadwal pelaksanaan) selaras dengan prioritas kebijakan, strategi dan program pemerintah pusat dan daerah, serta menyepakati dokumen final Rencana Kerja tersebut.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM

Agenda yang dibahas dalam Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI adalah :

1. Gambaran Umum Program Inovasi Model Graduasi untuk Mengurangi Kemiskinan (INTEGRASI)
2. Presentasi tentang prioritas, kebijakan, strategi dan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta keselarasan dengan pendekatan Graduasi dari 6 Provinsi yang masuk dalam Pilot Project Program Kemiskinan model Graduasi.
3. Menyusun Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program INTEGRASI.
4. Penyampaian Materi oleh Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri dengan materi Overview Kemiskinan di Indonesia. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam program graduasi kemiskinan adalah :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan

- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan UMKM
 - d. Sinergi kebijakan dan program yang dituangkan dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Penyampaian Materi oleh **I Ketut Supena** Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dengan materi **Pemberdayaan Sosial dalam rangka Penanganan Kemiskinan**. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah terkait dengan graduasi program perlindungan sosial yang meliputi Program Sembako dan PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara). Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (*Permensos No. 4 Tahun 2023 tentang Program Sembako*) sedangkan PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan/atau korban bencana.
 6. Penyampaian Materi oleh Abdurrahman Syebubakar Country Lead BRAC International, Indonesia dengan materi Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Graduasi. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia sebagian besar berada dalam kondisi rentan jatuh terhadap kemiskinan disebabkan oleh :
 - a. Ketidaktepatan sasaran – tingginya kesalahan inklusi dan eksklusi. Data statis, sementara kemiskinan dinamis. Data Susenas menunjukkan bahwa 52.4% rumah tangga miskin ekstrem tidak menerima Sembako/PKH sedangkan 2.5% rumah tangga terkaya menerima Sembako/PKH.
 - b. Cakupan dan nilai transfer program terbatas – rendahnya rasio kecukupan/kontribusi moneter program terhadap pengeluaran peserta.
 - c. Fragmentasi horizontal dan vertical: sumber data dan kriteria/indikator pensasaran berbeda-beda, koordinasi lemah antar pemangku kepentingan, dll
 - d. Lanskap pengelolaan perlindungan sosial sentralistik dengan kapasitas kelembagaan terbatas.
 - e. Akuntabilitas dan transparansi rendah, monitoring dan evaluasi lemah dan terfragmentasi.
 - f. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat terbatas dalam penetapan sasaran, akibatnya pemahaman peserta tentang profil program yang diterima terbatas – mereka tidak tahu program apa yang diterima dan dari siapa.
 7. Presentasi oleh masing-masing perwakilan provinsi daerah percontohan program graduasi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

8. Masing-masing daerah melakukan analisis dan menyusun program kerja untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dan keterlibatan BRAC dalam memperkaya program graduasi yang disusun daerah tersebut melalui peningkatan capacity building. Setelah dilakukan analisis maka masing-masing provinsi menyepakati melalui Berita Acara Kesepakatan, yaitu :
 - a. Menindaklanjuti Rencana Kerja Program INTEGRASI model graduasi untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
 - b. Menyediakan dukungan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan, pelaksanaan dan perluasan model graduasi.
 - c. Menyelenggarakan forum diskusi pendalaman di pusat dan daerah terkait pengembangan, pelaksanaan dan perluasan model graduasi.
 - d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja program INTEGRASI dengan kabupaten/kota model graduasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi.
 - e. Memetakan potensi program termasuk termasuk program pemberdayaan ekonomi (livelihoods) sebagai jangkar model graduasi dan mendayagunakan sumberdaya (kelembagaan, SDM dan anggaran) untuk mendukung pelaksanaan model graduasi dalam skala luas.
 - f. Membentuk Steering Committee atau Technical Working Group (TWG) di Pusat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait khususnya Bappenas, Kemendagri dan Kemensos.
9. Permasalahan :
 - a. Belum semua daerah percontohan sekuat menggunakan basis data dalam program graduasi yaitu data P3KE. Dalam program PENA yang merupakan program dari Kementerian Sosial dialokasikan kurang tepat sasaran dalam pemilihan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan tidak dilaksanakan secara kolaboratif sehingga daerah tidak banyak dilibatkan oleh Kementerian Sosial.
 - b. Program graduasi yang diberikan selama ini ternyata sebagian besar belum dapat mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan karena tidak adanya bimbingan yang berkelanjutan.
10. Pemecahan Masalah :
 - a. Memastikan adanya graduasi dalam program-program penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari garis kemiskinan.
 - b. Memperkuat program perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi (livelihood) dengan melakukan pendampingan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), membuat terobosan inovasi dan membuat komitmen bersama dalam perencanaan dan penganggaran program graduasi kemiskinan.

- c. Melibatkan multi pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Kesimpulan :

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI merupakan upaya dari BRAC Internasional untuk memperkuat daerah dalam pelaksanaan penurunan kemiskinan yang sudah berhasil dilaksanakan di berbagai negara terutama di Bangladesh dan India sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh daerah percontohan dengan menggunakan 4 pilar yaitu : perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.

Saran :

- a. Pemerintah daerah percontohan yang akan difasilitasi oleh BRAC dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem diharapkan sudah mengintegrasikan program graduasi dalam dokumen perencanaan daerah.
- b. Diharapkan BRAC dapat memfasilitasi kelembagaan TKPK dan Pukesos melalui pelatihan sehingga kualitas program yang dihasilkan lebih tepat sasaran dalam menjangkau KPM.



D. Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tanggal 28 s/d 29 Mei 2024 di Jakarta

Dasar :

1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.3/3407/Bangda tanggal 20 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/133/ND/EkoSDA/Bappeda/5/2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kegiatan Sosialisasi *IMT-GT Project on Economic Herb Production and Propagation Management throughout Value Chain*.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor 094.2/52/EkoSDA/Bappeda/5/2024 untuk Mengikuti kegiatan Rakor Pusda

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kegiatan Sosialisasi
*IMT-GT Project on Economic Herb Production and Propagation
Management throughout Value Chain.*

Pegawai yang ditugaskan :

1. Hendrick Kasmadiharja, S.STP, M.Si
2. Nizhamul Bastian, SH

Kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.3/3407/Bangda tanggal 20 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Direktur SUPD III di Grand Sahid Jaya Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat.

Pelaksanaan Kegiatan hari pertama :

a. Laporan Ketua Panitia

Kegiatan ini diikuti oleh Asdep Penanggulangan Kemiskinan KemenkoPMK, Asdep Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran KemenkoPMK, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT, Asdep Penanggulangan Kemiskinan Kemensetneg Setwapres, Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan upaya pencapaian kemiskinan ekstrem 0% yang ingin dicapai lebih awal sesuai amanat presiden berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

b. Sambutan dan pembukaan Dr. TB Chaerul Dwi Sapta (Dir. SUPD III Dirjen Bina Bangda Kemendagri).

Secara umum kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem dibedakan oleh pengeluaran per kapita masyarakat berdasarkan garis kemiskinan dengan nilai Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.550.458/kapita/bulan (Rp.2.593.657/rumah tangga miskin/bulan) dan Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional sebesar Rp.347.130/kapita/bulan atau setara dengan US\$ 1,9 (Rp.1.634.982/rumah tangga miskin/bulan).

Kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan berbagai perkembangannya seperti kenaikan garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi US\$ 2,15 dan berbagai agenda lainnya yang akan disampaikan oleh berbagai narasumber nantinya.

c. Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dr. Adyawardan (Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden/Kepala Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kemiskinan merupakan faktor multidimensi yang disebabkan oleh berbagai faktor, terkini kondisi Poverty rate Indonesia pada posisi 93 dengan peringkat 139 di dunia. Namun demikian kondisi ini lebih dipengaruhi oleh nilai GDP

penduduk yang masih rendah hanya 1,319,100 dengan pendapatan per kapita 4.788 US\$.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mengalami penurunan, meski Bank Dunia telah menetapkan perubahan terkait Garis Kemiskinan EKstrem baru sebesar US\$ 2,15 capaian Indonesia pada tahun 2023 masih cukup baik dengan kemiskinan ekstrem sebesar 1,88% jauh dibawah kemiskinna dunia 8,9%.

Berdasarkan perkembangannya, kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa 16 Provinsi masih di atas Angka Kemiskinan Nasional dan 18 Provinsi yang sudah di bawah Angka Kemiskinan Nasional (<9,4%), sementara itu 14 Provinsi sudah berada di bawah target nasional 7.5%. Sumatera Barat saat ini berada pada posisi 7 terendah secara nasional.

Sementara kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di seluruh provinsi dengan 13 provinsi masih berada diatas angka nasional 1,12% dan 18 Provinsi yang berada pada angka di bawah 1%. Meski secara umum mengalami penurunan, namun sebanyak 75 wilayah kabupaten/kota mengalami kenaikan nilai kemiskinan ekstremnya. Untuk Sumatera Barat, 17 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 2 lainnya mengalami kenaikan. Keberadaan TKPK dinilai sangat efektif dalam mendorong upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah, maka dari itu sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 400.4.7/1163/Bangda pada tanggal 24 Oktober 2023 untuk Kepala Daerah (KDH) yang dijabat oleh PJ maka diminta untuk merevisi SK TKPK dengan menjadikan Sekda sebagai Ketua TKPK.

Berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan, secara umum realisasi PPKE di Sumatera Barat tahun 2023 menunjukkan capaian realisasi pengurangan beban pengeluaran 98.09%, Meningkatkan Pendapatan 87.92% dan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan 92.54%.

Sebagai langkah percepatan maka konvergensi program menjadi kunci dalam penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memastikan rumah tangga desil 1 mendapatkan semua program perlindungan sosial dimana saat ini baru 0.37% rumah tangga desil 1 yang menerima total manfaat lebih dari Rp1,1 juta perbulan.

Sebagai langkah percepatan, maka perlu terus didorong keterlibatan multipihak melalui kolaborasi pentahelix dengan berbagai praktek baiknya baik media, perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan komunitas, serta CSR dan filantropi.

Saat ini sedang dilakukan pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) yang akan dirilis pada awal Juli 2024 yang dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan kemiskinan.

- d. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan kantong kemiskinan oleh Katiman Kartowinomo (Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK)

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, pusat dan daerah terus didorong untuk melakukan upaya terobosan dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Kondisi ini telah menunjukkan terjadinya penurunan secara signifikan dari 2,14% tahun 2001 menjadi 1,12% tahun 2023 dengan harapan dapat mencapai target 0% pada tahun 2024.

Mengingat tahun 2024 adalah tahun akhir target yang diharapkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas progress pelaksanaan upaya PPKE yang berkaitan dengan strategi pengurangan beban pengeluaran dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

Optimalisasi Pemanfaatan Data P3KE 2024 melalui penyesuaian kelompok kesejahteraan, mengakomodasi hasil verifikasi dan validasi, meminimalkan duplikasi data keluarga menunjukkan jumlah data keluarga dalam P3KE 2024 sebanyak 71.427.079 keluarga dimana diantaranya 2.414.976 merupakan keluarga baru dengan berbagai dinamika pergerakan tingkat kesejahteraan. Sehingga, selain upaya untuk mendorong masyarakat miskin (dsil 1) untuk tidak miskin (berada pada desil 2 dan seterusnya), juga perlu dilakukan upaya untuk menjaga masyarakat tidak miskin untuk tidak jatuh miskin (turun ke desil 1).

Adapun langkah strategis untuk memastikan ketercapaian pengentasan kemiskinan antara lain :

- Perbaiki sasaran penerima program
- Konvergensi program sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah
- Peningkatan kualitas implementasi program dengan memastikan penyaluran dan pelaksanaan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu
- Fokus upaya percepatan penurunan kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan tingkat dan jumlah kemiskinan yang tinggi
- Prioritas alokasi anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan pada wilayah pedesaan

Pelaksanaan Kegiatan hari kedua :

- a. Moderator, Bu Nur Budi dari KemenkoPMK
- b. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas oleh Adriansyah PhD Asdep Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian.

Penanggulangan kemiskinan menjadi konsenstrasi pemerintah baik kemiskinan itu sendiri ataupun kemiskinan ekstrem dengan target miskin ekstrem 0% di 2024.

Kemiskinan ekstrem dinilai sudah cukup berhasil dengan capaian dibawah 1,5% dengan capaian 1,12 pada maret 2023.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk mengangkat derajat miskin ekstrem ke level diatasnya/ tidak miskin, namun juga mengantisipasi potensi penurunan kondisi masyarakat tidak miskin ke level dibawahnya/miskin.

Roadmap PPKE saat ini sudah masuk tahap 3 periode 2023-2024 berdasarkan adopsi konvergensi nasional melalui pemberdayaan masyarakat, pemberian bansos dan penerapan data P3KE.

Inpres 4/2022, kementerian perekonomian diamanatkan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka percepatan PKE.

Kemenko selaku Pokja bertugas untuk mengidentifikasi, memetakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyalarsan dan monev program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem yang salah satunya melibatkan pemda.

Pokok kebijakan tahun 2024 :

- Optimalisasi program dengan 4 fokus intervensi berupa peningkatan pendapatan/akses pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan Kapasitas UMKM dan peningkatan akses pembiayaan UMKM
- Pemanfaatan data P3KE untuk penajaman dan pensasaran program
- Lokus konvergensi di Kawasan perdesaan dan daerah daerah miskin ekstrem tinggi
- Keterlibatan pemda dan pemdes untuk konvergensi
- Mobilisasi non pemerintah melalui kemitraan multipihak dalam pemberdayaan

- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Penurunan Kemiskinan, ArifAbdul Majid, S.I.P (Penata Kelola Pemerintahan pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa)

Kondisi Desa saat ini :

- Walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di Desa masih tinggi 12,22%.
- Angka stunting masih tinggi 21,6%, belum memenuhi target 14% di 2024
- Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,37% tahun 2024
- Pembangunan desa masih terdapat desa tertinggal 7.154 Desa dan desa sangat tertinggal 4.850 Desa.

Semangat transformasi desa sebagai subyek utama pembangunan, desa dituntut inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi melalui :

- Mendorong aktivitas dan potensi berbasis kearifan local yang produktif dan bernilai ekonomis
- Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal

Kebijakan dana desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin untuk penyelesaian permasalahan Desa serta pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa agar memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup,

peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik

Alokasi penggunaan dana desa untuk TA 2024 digunakan untuk :

- penanganan kemiskinan ekstrem, paling tinggi 25 % untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan)
- program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20%
- program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan/atau
- program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % dari pagu Dana Desa setiap Desa



Salah satu item dari contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan melalui pembangunan sarpras desa adalah pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan

Bahan paparan dapat diakses melalui https://drive.google.com/drive/folders/1n_WpCgA8I5osUzpyNNDVhdUmNx_iyyR



E. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 September 2024 di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dibuka oleh Plt. Gubernur Sumatera Barat Bpk. Audi Joinaldi sekaligus sebagai *keynote speaker*, diikuti oleh Kepala Daerah/Ketua TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, OPD Provinsi terkait, Instansi Vertikal Provinsi serta Organisasi dan Lembaga Provinsi. Rakor diawali dengan laporan ketua pelaksana kegiatan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat Winny Sayori, ST, MMP yang dalam laporannya menyatakan :

1. Latar belakang :

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional sesuai Tema RKP tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Arah Kebijakan pertama yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta ditetapkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan maka diperlukan upaya-upaya mendorong peran aktif dan membangun sinergitas multipihak baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta stakeholder terkait lain seperti halnya organisasi non-pemerintah. Sebagai upaya untuk membangun sinergitas tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat bermaksud menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 bertempat di Aula Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2. Dasar pelaksanaan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-242-2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- d. Surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor 8-24/SWP/D-2/KM. 00/09/2024 tanggal 22 September 2024 perihal Kordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat.

3. Maksud dan tujuan :

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran aktif dan membangun sinergitas diantara stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) lingkup Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
- b. Membangun komunikasi diantara para pemangku kepentingan terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.
- c. Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka memperoleh insentif fiskal bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- d. Menyepakati percepatan penurunan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan daerah secara bersama oleh Ketua TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Bentuk dan output kegiatan :

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas diantara stakeholder yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pertemuan dan ramah tamah, serta pemaparan materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan komunikasi secara dua arah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan saran serta rekomendasi yang bermanfaat dalam rangka upaya percepatan penurunan kemiskinan di Sumatera Barat. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong upaya perolehan insentif fiskal bagi kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

5. Narasumber :

- a. Plt. Gubernur Sumatera Barat sebagai *keynote speaker*
- b. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI
- c. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri.
- d. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DKJPK, Kemenkeu.
- e. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Setwapres/ Sekretariat TNP2K

a. **Keynote speaker Plt. Gubernur Sumatera Barat :**

Secara singkat kondisi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung menurun. Pada kondisi bulan Maret tahun 2019 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,42% dan pada kondisi Maret tahun 2024 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 5,97 % atau sebanyak 345.730 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikonsumsi oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan rumah tangga merupakan hasil perkalian GK per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Pada Maret 2024, secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga miskin di Sumatera Barat pada periode Maret 2024 adalah sebesar Rp3.924.625,- per rumah tangga miskin per bulan.
3. Ke depan, tugas kita bersama adalah berupaya meningkatkan berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan komitmen bersama kami yakin kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :
 - a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
 - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.
- Permasalahan Kemiskinan di Prov. Sumatera Barat :
- a. Tingginya angka pengangguran
 - b. Ketimpangan kualitas SDM di Kota dan Kabupaten
 - c. Ketimpangan akses penduduk miskin di kabupaten terhadap pelayanan dasar
 - d. Kondisi kemiskinan makro mengindikasikan terdapat masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi

- e. Efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah digulirkan dirasa belum optimal untuk menurunkan angka kemiskinan

Fakta kondisi masyarakat miskin di Sumatera Barat : Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Sumbar : 47.20, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sumbar masih menanggung hidup 47 orang penduduk usia tidak produktif (BPS Sumbar, 2024

Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2023 :

- a. Secara Nasional, Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat berada pada posisi ke 7 Terendah.
- b. Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat Tahun 2023 turun menjadi 0,41% (berkurang 0,36% dari tahun 2022 atau berkurang 20.418 jiwa)

Indikator Kinerja Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan kesepakatan Kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi ditetapkan beberapa indikator penilaian kinerja daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada semester 1 tahun 2023, yaitu :

1. Kepatuhan Pemda dalam Pemanfaatan dan Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
2. Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
3. Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023 dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Program percepatan penurunan kemiskinan Sumbar yang akan dilaksanakan oleh OPD Provinsi TA. 2024 sebesar Rp. 681.350.207.503,- pada 19 Perangkat Daerah sengan 186 sub kegiatan

b. Narasumber Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden / Sekretaris Eksekutif TNP2K :

1. Target angka kemiskinan dalam RPJMN belum pernah tercapai sejak tahun 2005, walaupun capaian kemiskinan Maret 2023 sebesar 9,03% merupakan prestasi, karena lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi dan menjadi angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah, namun masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5% - 7,5% pada tahun 2024
2. Di sisi lain, perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini adalah sebesar 0,83%, meskipun penurunannya mengalami pelambatan, setidaknya sudah dapat mendekati 0%.
3. Penting memastikan strategi kebijakan untuk kemiskinan ekstrem tetap dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memastikan perpanjangan regulasi terkait kemiskinan ekstrem dapat terintegrasi dengan aturan lain yang berlaku saat ini.
4. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar dapat mendekati atau mencapai target, terutama jika dasar perhitungan Garis Kemiskinan Ekstrem berubah dari \$1,9 PPP menjadi \$2,15 PPP

Tren penurunan kemiskinan cenderung melambat sejak tahun 2017 dan perlu upaya khusus untuk mencapai target angka kemiskinan 6,5% - 7,5% di RPJMN pada tahun 2024

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dasar Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :

1. Penanggulangan Kemiskinan :
 - a. **Perpres 96/2015** tentang Perubahan atas Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - b. **Permendagri 53/2020** tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
2. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
 - a. **Inpres 4/2022** tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - b. **Kepmenko PMK 25/2022** tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024
 - c. **Kepmenko PMK 30/2022** tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - d. **Kepmenko PMK 32/2022** tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - e. **Kepmenko PMK 33/2022** tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
3. Kunci untuk Mencapai Target Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem :
 - a. Meningkatkan Ketepatan sasaran program
Pemanfaatan Database yang memiliki peringkat untuk menentukan sasaran manfaat program
 - b. Memastikan Konvergensi Program
Integrasi dan sinergi program dari APBN, APBD, APBDes dan anggaran dari sumber lainnya
 - c. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan program
Pelaksanaan program dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip, tujuan dan mekanisme yang baik
4. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
 - a. Tantangan 1 :
Perubahan Garis Kemiskinan Ekstrem dari \$1,9 PPP menjadi \$2,15 PPP
 - b. Tantangan 2 :
 - c. Pentingnya konvergensi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - d. Tantangan 3 :

- e. Perlunya melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan program perlindungan social
- f. Tantangan 4 :
Data Pensasaran; Belum ada sistem yang menghubungkan basis data penyasaran yang tersebar di berbagai K/L dan pemerintah daerah
- g. Tantangan 5 :
Regulasi terkait Kemiskinan Ekstrem: Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem akan berakhir pada tahun 2024.

Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat



- Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat **naik 0,02%** dalam periode 2023-2024, artinya penduduk miskin bertambah sekitar 5.360 penduduk
- Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat juga meningkat **0,16%** dalam periode 2023-2024.



- Angka kemiskinan cenderung meningkat, pada Maret 2024 sebesar 5,97 persen atau naik sebesar 0,02 persen poin jika dibandingkan dengan angka Maret 2023, yaitu sebesar 5,95 persen.
- Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Dimana pada 2020 mencapai -1,62 karena pandemi Covid-19, meningkat tajam di 2023 sebesar 4,62 persen dan triwulan ke 2 (y-o-y) tahun 2024 sekitar 4,71.
- Gini ratio cenderung menurun pada maret 2020 sebesar 0,31 menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,28

c. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri

1. Secara internasional, kemiskinan eskترم adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (purchasing power parities). Pada tahun 2023, nilai US \$ 1,9

PPP = Rp 11.924 per kapita per hari Rp.362.692 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia memiliki 4,78 orang anggota keluarga, maka Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional adalah sebesar Rp.1.733.667/rumah tangga miskin/bulan.

2. Arahan Wapres terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tanggal 18 September 2024 :
 - a. Pemanfaatan insentif fiskal untuk perkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penggunaannya difokuskan pada kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
 - b. Target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE agar intervensi tepat sasaran. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas
 - c. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu semakin diintensifkan. Mencakup Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.

d. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DKJPK, Kemenkeu

Dalam mewujudkan impian Indonesia emas 2045 disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Manusia dan penguasaan iptek
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

Intensif fiskal, indikator kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem ;

Hasil kesepakatan kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi, diputuskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah di semester I tahun 2024 dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, yaitu:

	Indikator Penilaian	Bobot	Subindikator
	kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah	25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ▪ Status Rencana Aksi Tahunan 2024
	kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data P3KE	25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK penetapan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ▪ Lampiran SK penetapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ▪ Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TW I dan TW II 2024
	Belanja penandaan kemiskinan ekstrem	50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja bersifat Langsung ▪ Belanja Tidak langsung ▪ Belanja Penunjang

e. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Setwapres/Sekretariat TNP2K

1. Angka Kemiskinan Umum dan Ekstrem di INDONESIA terus menurun, namun menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai target akhir 2024. Angka Kemiskinan Umum dan Kemiskinan Ekstrem di SUMATERA BARAT sudah di bawah Angka Nasional, namun masih berfluktuatif serta membutuhkan Upaya Khusus untuk terus menurunkan dan mencapai target
2. Kunci Utama Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
 - a. Kualitas implementasi :
 - Pelaksanaan program dijalankan sesuai dengan prinsip dan mekanisme program yang telah ditentukan dan akuntabel
 - Kualitas Pelaksanaan program dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi
 - b. Perbaikan pensasaran :
 - Dalam penyaluran bantuan, masih terdapat inclusion error (yang tidak berhak) dan exclusion error (yang belum terjangkau)
 - Perlu data yang akurat yang berisi informasi multi-dimensional (monetary, pendidikan, kesehatan, sanitasi, pemukiman, dll) untuk menjamin keadilan sosial (ketepatan sasaran, prioritas dan afirmasi)
 - Perlu kepastian mekanisme yang secara cepat dapat melakukan verifikasi dan validasi usulan dan perubahan data penerima program
 - Perlu pemadu-padanan antara Data DTKS (Kemensos), P3KE (Kemenko PMK), Regsosek (Bappenas) dan Dukcapil (Kemendagri)
 - c. Konvergensi Program :

Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan keterpaduan serta sinergi program dan anggaran baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya.
3. Tantangan Pencapaian Target Kemiskinan dan PPKE
 - a. Penyempurnaan basis data penetapan sasaran
 - b. Menjangkau kelompok exclusion error program regular
 - c. Graduasi kelompok inclusion error program regular
 - d. Perbaikan kelembagaan pelaksanaan program dan penetapan sasaran
4. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem disebabkan masalah multi-dimensi yang membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor, lintas pemerintahan dan melibatkan aktor non-pemerintah.
5. Dua instrumen utama kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 adalah :

- a. Perbaikan akurasi data pensasaran didorong dengan pemanfaatan data P3KE yang memiliki rangking kesejahteraan dan mengandung karakteristik sosial ekonomi
- b. Konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantong kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem
6. Kondisi kemiskinan yang multidimensi: dipengaruhi oleh banyak faktor
 - a. Pensasaran program diprioritaskan pada kelompok 25% terbawah data BNBA yang berperingkat
 - b. Fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat dan/atau jumlah kemiskinan tinggi.
7. Kondisi kemiskinan ekstrem yang sangat dinamis: masuk dan keluar kondisi kemiskinan ekstrem dapat terjadi dalam waktu pendek
 - a. Pensasaran program perlu ditujukan pada sekitar 1,5-2 kali tingkat kemiskinan ekstrem –menjangkau keluarga miskin ekstrem dan “rentan miskin ekstrem”
 - b. Prioritas dengan memastikan keluarga exclusion error memperoleh program yang diperlukan





F. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 tanggal 6 November 2024 di Grand Royal Denai Bukittiggi

Bimbingan teknis penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029 dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, ST, MM sekaligus sebagai *keynotes speaker*.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD sejatinya adalah rencana kebijakan pembangunan yang disusun oleh daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari strategi dan program-program pembangunan yang berkaitan dengan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunannya dilakukan sejalan dengan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan dan Sumber Daya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada Ayat 2 Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hal ini tentunya menjadi

tanggungjawab kita bersama, terutamanya Bappeda dan Dinas Sosial selaku Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat TKPK yang akan menjadi ujung tombak dalam penyusunan dokumen RPKD ini nantinya.

Sesuai dengan Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025 – 2045 yakni Penguatan Fondasi Transformasi, salah satu Fokus Agenda Pembangunan pada Tahun 2025 – 2029 adalah Transformasi Sosial melalui penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Melalui penyusunan dokumen RPKD yang akan disusun setelah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis hari ini, diharapkan dapat tersusunnya rencana kebijakan pembangunan penanggulangan kemiskinan daerah di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1. Laporan Ketua Panitia, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat Winny Sayori, ST, MMP

Latar belakang pelaksanaan Bimtek :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan dan Sumber Daya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada Ayat 2 Pasal 4 dan Pasal 5 diamanatkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.3/4403/Bangda tanggal 24 Juni 2024 perihal Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), salah satu langkah teknis yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 bertempat di Grand Royal Denai Hotel Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Maksud dan tujuan :

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran aktif TKPK Daerah terutamanya Bappeda dan Dinas Sosial selaku Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat TKPK dalam membangun sinergitas diantara Stakeholder dalam penyusunan dokumen RPKD di Sumatera Barat dengan tujuan :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029.

- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan TKPK Daerah terhadap aspek teknis dan kebijakan penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan.
- c. Mendorong integrasi penyusunan RPKD dengan RPJMD di Sumatera Barat.
- d. Meningkatkan pemahaman bagi daerah akan pentingnya dokumen RPKD yang terintegrasi dengan RPJMD dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta dalam rangka memperoleh insentif fiskal bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Bentuk dan output kegiatan :

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas diantara stakeholder terkait yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pertemuan dan ramah tamah, pemaparan materi oleh narasumber yang disertai diskusi, serta pelatihan teknis terkait penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terutamanya bagi Sekretariat TKPK terhadap aspek teknis dan kebijakan penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan. Selain itu juga diharapkan dengan tersedianya dokumen RPKD yang terintegrasi dengan RPJMD nantinya dapat mendorong upaya perolehan insentif fiskal bagi daerah di Sumatera Barat.

Peserta :

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 diikuti oleh :

- a. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- c. Bappeda Kabupaten/Kota
- d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- e. BRAC Internasional

2. Narasumber Tb. A. Choesni, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 – 2029 untuk Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Target RPJPN Indonesia Emas 2045 :

- Tingkat Kemiskinan (2045): 0,5 – 0,8
- Tingkat Rasio Gini (2045): 0,290-0,320
- Tingkat Pengangguran Terbuka (2045): 4,0

Kondisi dan Target Kemiskinan Nasional

Kondisi Saat Ini :

- Tingkat Kemiskinan (2024): 9,03
- Tingkat Rasio Gini (2024): 0,379

- Tingkat Pengangguran Terbuka (2024): 4,82
- Target RPJMN Teknokratik :
- Tingkat Kemiskinan (2029): 4,5 – 5,0
 - Tingkat Rasio Gini (2029): 0,372 – 0,375
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (2029): 4,0 – 5,0
- Target RPJPN Indonesia Emas 2045
- Tingkat Kemiskinan (2045): 0,5 – 0,8
 - Tingkat Rasio Gini (2045): 0,290 – 0,320
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (2045): 4,0

Tantangan Multidimensi dalam Menurunkan Kemiskinan

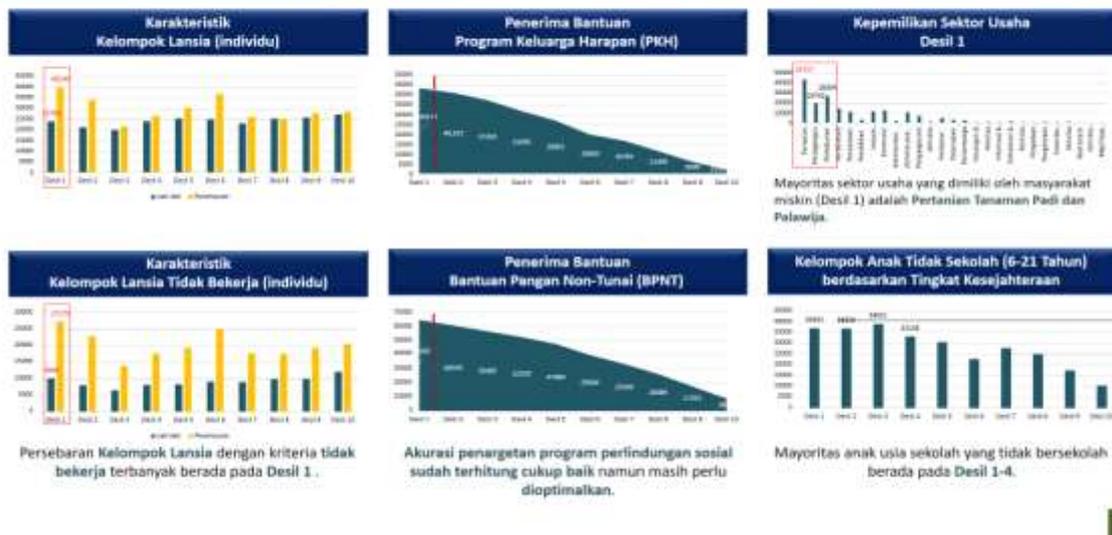
- a. Data belum terintegrasi antar K/L
Pengelolaan dan integrasi data yang belum optimal sehingga ketepatan sasaran rendah dan konvergensi program belum optimal.
- b. Program belum tepat sasaran
Program perlindungan sosial belum komprehensif dalam memenuhi kebutuhan kelompok miskin, rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- c. Integrasi dan koordinasi K/L dengan pemerintah daerah masih rendah
Belum optimalnya koordinasi dan pembagian kewenangan antar K/L dan pemerintah daerah serta kapasitas pemerintah daerah yang belum optimal.
- d. Program pemberdayaan belum terintegrasi
Akses pada pemberdayaan dan aset produktif belum tersedia secara merata khususnya pada kelompok yang paling rentan.
- e. Keterbatasan infrastruktur dasar
Pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar yang belum merata dan perlu peningkatan kualitas.
- f. Terbatasnya kapasitas APBD dan APBN
Mengoptimalkan blended financing untuk program penanggulangan kemiskinan.
- g. Mengubah pola pikir masyarakat miskin dan rentan untuk mandiri
Perlu peningkatan kemandirian masyarakat, literasi keuangan, dan kesadaran untuk mengakses jaminan sosial.

Perencanaan Berbasis Data dan Bukti dengan Regsosek

- a. SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. SEPAKAT menggunakan data REGSOSEK yang bisa di-disagregasi By Name By Address (BNBA) untuk memberikan informasi kondisi berbasis desa
- b. Regsosek merupakan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI) dan dapat terintegrasi dengan berbagai data sektoral melalui variabel Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berada di bawah rata-rata kemiskinan secara nasional. Tingkat kemiskinan terakhir Maret 2024, berada pada angka 5,97% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 345,73 ribu jiwa. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten yang memiliki tingkat



kemiskinan paling tinggi dan satu-satunya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Namun secara jumlah penduduk miskin, Kabupaten Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu 41,4 ribu jiwa dan 36,05 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Provinsi Sumatera barat per tahun 2024 sebesar Rp. 708.416,00/kapita/bulan.

Program Kementerian/Lembaga di Provinsi Sumatera Barat

- a. Program Perlindungan Sosial (Kementerian Sosial)
 - 107,983 Keluarga miskin belum menerima PKH
 - 86,674 Keluarga miskin belum menerima BPNT
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - 42,513 Kepala Keluarga miskin tidak bekerja
 - 55,561 Kepala Keluarga miskin memiliki usaha ultra mikro (<5 juta/bulan)
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR)
 - 69,633 Kepala Keluarga miskin dengan kontrak/sewa atau bebas sewa atau lainnya
 - 35,501 Kepala Keluarga miskin dengan sumber air minum non-leding
- d. Program Indonesia Pintar (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi)
 - 108,610 Individu dengan usia 6-18 Tahun tidak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar

3. Sutikno, Sekretariat TNP2K, Setwapres

Berbagai Upaya Pengentasan Kemiskinan 5 Tahun Terakhir :

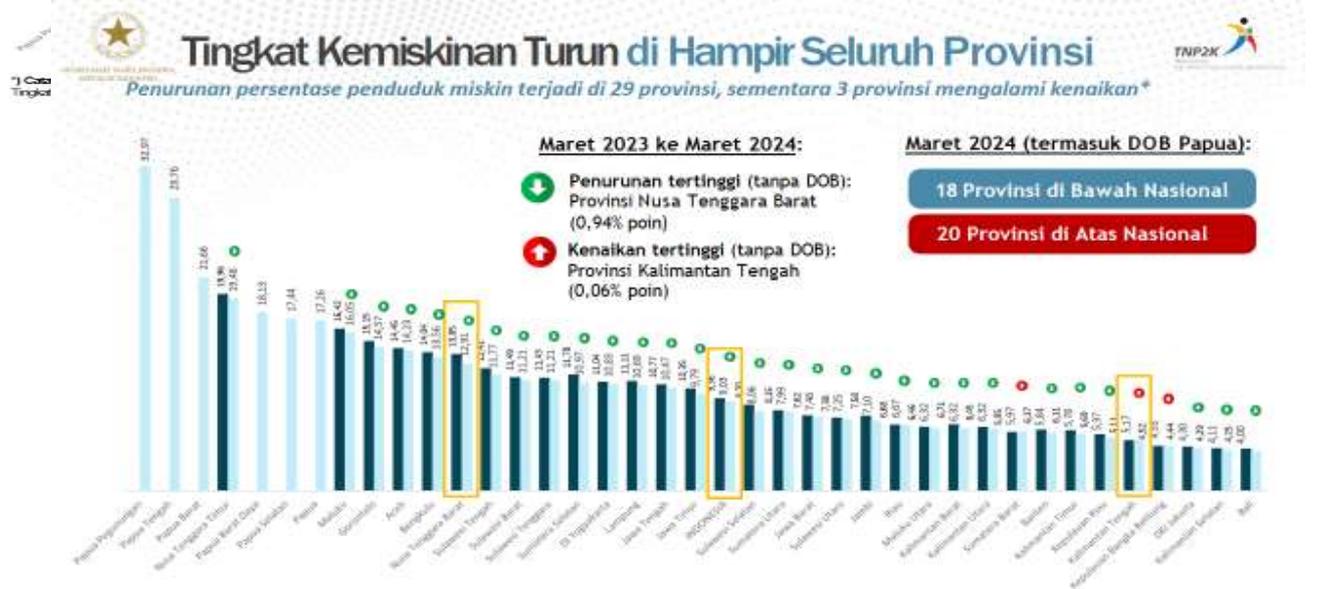
- a. Perluasan bantuan sosial dan peningkatan dukungan anggaran
- b. Inovasi program peningkatan pendapatan melalui active labour market policy
- c. Mobilisasi perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19
- d. Mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10%

Masih Terdapat Tiga Masalah Kesejahteraan Utama di Indonesia

- a. Kemiskinan, Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan per Maret 2024 sebanyak 25.22 juta orang atau 9.03% dari seluruh populasi.

- b. Kerentanan, Sebagian penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan, dimana ½ penduduk Indonesia memiliki tingkat konsumsi 2x garis kemiskinan.
- c. Kesenjangan
Meskipun rerata ketimpangan sedikit menurun antara tahun 2014- 2024, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Target Pemerintahan Prabowo – Gibran (2025 – 2029) : Kemiskinan <6% (2029)
Kemiskinan ekstrem 0% (2026)



* Catatan: Perubahan belum mencakup DOB Papua. Tingkat kemiskinan untuk DOB baru tersedia di 2024 sehingga belum ada data pembandingan.

■ Maret 2023 ■ Maret 2024

Rekomendasi Kebijakan

- a. Perbaikan penyasarannya penerima program
Memastikan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan data bersasaran individu dan keluarga/rumah tangga by- name-by-address (BNBA) berperingkat dengan prioritas kelompok 25% terbawah.
- b. Konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah
Penurunan kemiskinan akan menjadi lebih signifikan apabila rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu jenis program, yang untuk

mencapai target angka kemiskinan, nilai kedalaman kemiskinan dapat digunakan sebagai proxy untuk menentukan tambahan nilai bantuan.

- c. Peningkatan kualitas implementasi program dengan memastikan penyaluran dan pelaksanaan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu
Perlu penyiapan program graduasi bagi KPM program yang sudah tidak layak menerima manfaat program untuk memastikan program yang dijalankan adaptif terhadap dinamika kemiskinan

4. Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri

Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2024 adalah sebesar Rp.708.416/kapita/bulan. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 orang anggota keluarga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp.3.924.625/rumah tangga miskin/bulan.

Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat selalu jauh dibawah rata-rata nasional, namun demikian, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir (paska Covid-19) mengalami kenaikan disaat angka kemiskinan nasional justru mengalami penurunan.

Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat yang telah melaporkan penerapan SPM seluruh bidang untuk periode TW III Tahun 2024. Penerapan SPM seluruh bidang telah di-tagging ke dalam pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kemiskinan Ekstrem, sehingga pemerintah daerah yang melaksanakan penerapan SPM pada dasarnya turut mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemda dengan capaian di atas rata-rata nasional TW III Tahun 2024 atau >75% agar tidak berpuas diri karena penerapan SPM dilaporkan secara akumulatif per triwulan, sehingga pemda perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk keberlangsungan penerapan SPM hingga TW IV

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT)

RPKD Provinsi dan RPKD Kab/Kota disusun sebagai penjabaran dari Strategi dan Program (Pasal 20). RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD

Rencana Aksi Tahunan (RAT) paling sedikit memuat :

- Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
- Kebijakan dan strategi tahun berjalan.
- Matriks target keberhasilan.
- Lokasi prioritas.

Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota merupakan penjabaran dari RPKD

RPKD :

Memuat profil kemiskinan di wilayahnya termasuk kantong-kantong kemiskinan di kecamatan hingga ke kelurahan, sehingga program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan penyebab kemiskinan dan difokuskan ke kelurahan yang memiliki angka kemiskinan terbanyak.

Program penanggulangan kemiskinan yang di-tagging oleh Kementerian Dalam Negeri telah membantu pemerintah daerah dalam memetakan program/kegiatan/sub-kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga lebih terarah.

RPKD Pemerintah Daerah harus dapat menunjukkan kesinambungan program untuk memastikan program yang diberikan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem berlangsung sepanjang hayat.

Kementerian Dalam Negeri akan kembali melakukan tagging program/kegiatan/sub-kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan untuk tahun depan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Tagging program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah harus diarahkan untuk yang bersifat berkelanjutan dan saling bersinergi.

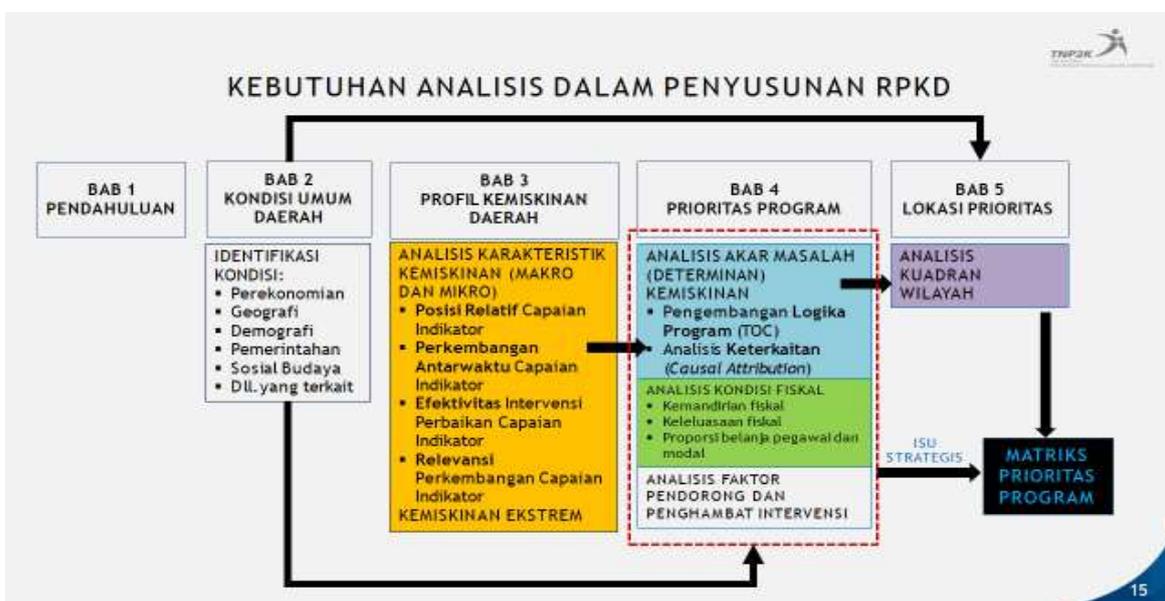
5. Siti Alifah Farhana Dinanta Ahyar, Spesialis Perencanaan dan Penganggaran pada Unit Advokasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K. (Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029)

Kapan RPKD disusun, karena RPKD bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD. RPKD berlaku untuk lima tahun.

Yang menyusun RPKD : TKPK dan Tim Teknis, Pakar (dari Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian), Tim Penyusun RPJMD dan unsur lain yang diperlukan

Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

- a. Pendahuluan
- b. Kondisi umum daerah
- c. Profil kemiskinan daerah
- d. Prioritas program
- e. Lokasi prioritas



Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Rencana Aksi Tahunan merupakan penjabaran dari Matriks Prioritas Program penanggulangan kemiskinan lima tahun di dalam RPKD

Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode satu tahun, yang memuat informasi:

- Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- Kebijakan dan strategi tahun berjalan
- Matriks target keberhasilan serta
- Lokasi prioritas.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

- Pendahuluan
- Kelembagaan Penanggulangan kemiskinan
- Capaian dan analisis
- Rencana tindak lanjut
- Penutup



G. Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan monitoring dan evaluasi atas program-program terkait penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya rangka pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan data kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim Tahun 2024, untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

1. Kabupaten Pesisir Selatan :

Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah sehingga tidak merubah SK Tim TKPK tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dan LP2KD tahun 2023. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 masih dalam proses, dan penetapan SK oleh Kepala Daerah masih dalam proses serta belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah : belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu (Rp)

Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran (Rp)

Strategi Meningkatkan Pendapatan (Rp)

Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan (Rp)

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

2. Kabupaten Agam :

Kabupaten Agam sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan sudah merubah SK Tim TKPK tahun 2024. Dalam penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 128.088.184.535,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 87.087.383.327,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 7.012.202.948,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 33.988.598.262,-

Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan 2 kali dalam 1 tahun

3. Kota Pariaman :

Kota Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 dalam proses penyusunan. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota belum melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu	:
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:

Strategi Meningkatkan Pendapatan :
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan :
Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

4. Kota Padang Panjang :

Kota Padang Panjang sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 27.695.235.226,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 15.749.036.500,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 7.041.642.690,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 4.904.556.036,-

Pelaksanaan Rakor TKPK dilaksanakan pada Minggu ke-2 Juli 2024 dan Minggu ke 2 Desember 2024

5. Kabupaten Padang Pariaman :

Kabupaten Padang Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan masih dalam proses menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 dalam proses penyusunan. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu :
 Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran :
 Strategi Meningkatkan Pendapatan :
 Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan :
 Pelaksanaan Rakor TKPK Belum (direncanakan 2 kali dalam 1 tahun (Juli dan Desember))

6. Kabupaten Solok :

Kabupaten Solok sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, dalam proses penetapan SK oleh KDH verifikasi dilakukan saat nagari sudah musyawarah Nagari dan proses penetapan menunggu Musyawarah Nagari dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 176.831.433.693,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 985.653.099,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 97.121.123.516,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 78.724.657.078,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

7. Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Belum ada data

8. Kabupaten Solok Selatan :

Kabupaten Solok Selatan sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 57.946.391.968,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 32.403.326.541,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 2.879.827.964,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 22.663.237.463,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

9. Kota Bukittinggi :

Kota Bukittinggi sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA belum dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: .
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:
Strategi Meningkatkan Pendapatan	:
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	:

Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan bulan september 2024

10. Kabupaten 50 Kota :

Kabupaten 50 Kota sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan dijabat oleh Sekda. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses penyusunan, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK

Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi karena dalam proses verifikasi dan validasi nagari data P3KE 2023

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan b dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 24,869,951.970,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 18,315,056,350,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,560,377,920,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 4,994,517,700,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

11. Kabupaten Pasaman Barat :

Kabupaten Pasaman Barat sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah didapatkan data P3KE pemutakhiran 2024.

Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi verifikasi BNBA P#KE berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD

Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 202,896,400,294,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 126,616,860,015,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 10,035,217,429,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 66,244,322,850,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

12. Kota Sawahlunto :

Kota Sawahlunto sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses dan belum disampaikan ke

Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi. Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 39,506,876,291,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 25,358,212,934,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 747,141,465,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 13,401,521,892,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

13. Kabupaten Sijunjung :

Kabupaten Sijunjung sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah ditetapkan dan disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi. Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 126,016,003,177,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 34,685,011,623,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 31,896,592,087,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 62,434,398,747,-

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

14. Kabupaten Tanah Datar :

Kabupaten Tanah Datar sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses karena dari 75 nagari, belum semuanya melakukan pemutakhiran data, jadi belum disampaikan ke P3KE. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses, dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh

Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 39.809.792.718,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 35.695.374.310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1.030.246.700,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2.322.781.808,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

15. Kota Padang

Belum ada data

16. Kota Solok :

Kota Solok sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah sampaikan ke Provinsi. Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 61,578,413,504,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 37,891,607,541,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,633,178,200,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2,053,627,763,-

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

17. Kabupaten Pasaman :

Kabupaten Pasaman sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum

disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 belum, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 151,283,604,960,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 96,976,445,100,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 2,324,923,000,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 51,982,236,860,-
Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan	

18. Kabupaten Dharmasraya :

Kabupaten Dharmasraya sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD belum disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 89,382,571,523,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 66,508,623,400,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 3,489,562,350,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 19,384,385,773,-
Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan	

19. Kota Payakumbuh :

Kota Payakumbuh sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan, Sekda sebagai ketua TKPK. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan

sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 116,005,975,979,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 4,360,795,310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 59,257,545,222,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 52,387,635,447,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024

H. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 penyusunan finalnya dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi, Kabupaten/Kota;

2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi, kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023, maka di tuangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat :

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan, program dan kegiatan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
- c. Untuk melakukan sinkronisasi program – program kemiskinan yang ada.

2. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah :

- a. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. Menjelaskan sinergitas dan sinkronisasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan juga dalam pelaksanaan di lapangan.
- d. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atau sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
- e. Mengetahui capaian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.

- g. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

3. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
- g. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- m. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- n. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

4. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provisi Sumatera Barat

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kemiskinan merupakan urusan kompleks yang melibatkan berbagai bidang, oleh karenanya pemerintah sebagai institusi memiliki kewenangan untuk membuat, mengatur, melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan kolaborasi lintas instansi. Salah satu kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang juga diikuti dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Kepmendagri No. 42 tahun 2010 tentang bentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Perangkat Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- g. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi, pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibentuk merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang melibatkan 21 Perangkat Daerah, 15 dari Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan Media dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar
8. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
15. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
18. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat
19. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
20. BKKBN Provinsi Sumatera Barat
21. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat

22. PT. Semen Padang
23. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas Padang
24. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Padang
25. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
26. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Taman Siswa Padang
27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Muhammad Natsir Bukittinggi
28. TVRI Sumatera Barat
29. RRI Padang

Tim Pelaksana Koordinasi akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk tim Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan;

5. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2023 setelah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada 18 OPD adalah sebesar Rp. 1.086.885.631.376,- atau sebesar 16,11% dari jumlah APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 6.745.620.583.086,- dengan rancangan sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PER OPD TAHUN 2023

NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2023	REALISASI	% TAHUN 2023
1	Dinas Sosial	112.321.837.760	57.384.037.520	57.065.945.591	51,09%
2	Dinas Kesehatan	212.817.716.792	100.690.710.650	98.527.593.450	47,31%
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	133.719.966.410	33.878.118.390	30.318.014.338	25,34%
4	Dinas Kehutanan	82.173.410.624	13.225.962.211	4.411.966.865	16,10%
5	Dinas Pendidikan	2.294.603.253.568	501.954.348.378	492.919.446.980	21,88%
6	Dinas Perhubungan	18.377.116.366	52.082.550	48.664.760	0,28%
7	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	335.188.071.338	18.693.659.930	18.056.633.630	5,58%
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	123.439.717.450	114.437.432.438	112.384.311.489	92,71%
9	Dinas Pariwisata	51.887.187.201	6.414.212.000	6.321.721.150	12,36%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.644.654.569	9.578.147.000	8.155.713.725	26,14%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.837.588.451	24.427.185.586	24.182.448.103	27,19%
12	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	227.427.394.533	89.035.827.538	64.308.646.357	39,15%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	26.374.822.452	6.310.657.650	5.572.183.611	23,93%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.980.250.473	11.148.676.478	10.885.061.979	44,63%
15	Dinas Pangan	41.537.885.090	18.842.219.803	14.224.546	45,36%
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	37.731.641.327	24.342.004.120	16.806.874.213	64,51%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.058.418.805	8.700.696.864	8.274.538.528	29,94%
18	Dinas Peternakan dan Keswan	92.014.751.589	47.769.652.270	47.427.948.792	51,92%
Jumlah		3.970.135.684.798	1.086.885.631.376	1.005.681.938.107	27,38%
TOTAL APBD PERUBAHAN TAHUN 2023			6.745.620.583.086		16,11%

I. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Untuk lebih terarah penanggulangan kemiskinan terutama di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2021-2026, serta dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 dalam rangka untuk percepatan penanggulangan

kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya TKPK Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, perlu diselenggarakan fungsi penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sumatera Barat Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Maksud disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah,
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan,
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
4. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menjadi Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2024.

LAMPIRAN
MATRIK MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
KE KABUPATEN / KOTA

**MATRIK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KE KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

No	Kabupaten/kota	SK Tim TKPK Kabupaten/kota		Penyusunan Dokumen Kemiskinan			Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK	Tindaklanjut data P3KE 2023 okeh Kab/Kota			Tindaklanjut data P3KE 2024 okeh Kab/Kota			Pelaporan PPKE secara online TW I 2024	Update informasi perkembangan dokumen	Upload Dokumen kemiskinan	Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah				Pelaksanaan Rakor TKPK
		KDH dijabat Pj (Ya/Tidak)	SK Tim	RPKD	RAT 2024	LP2KD 2023		Verifikasi dan Validasi data P3KE BNBA	Penetapan SK oleh KDH	Disampaikan ke Provinsi	Penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024	Penetapan SK oleh Kepala Daerah	Disampaikan ke Provinsi				Total alokasi pagu (Rp)	Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran (Rp)	Strategi Meningkatkan Pendapatan (Rp)	Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kab. Agam	Ya	Sudah	Sudah	Dalam proses, masih bentuk tabel belum dokumen	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	128.088.184.535	87.087.383.327	7.012.202.948	33.988.598.262	Belum (direncanakan 2 kali dalam 1 tahun)
2	Kab. Padang Pariaman	Ya	Dalam proses penyusunan	Dalam proses penyusunan	Dalam proses penyusunan	Dalam proses penyusunan	Dalam proses	Belum	Dalam proses	Belum	Dalam proses	Dalam proses	Belum	Belum	Belum	Belum					Belum (direncanakan 2 kali dalam 1 tahun (Juli dan Desember))
3	Kab. Pasaman	Tidak	sudah	sudah	Belum	Belum	sudah	sudah	Belum	Belum	dalam proses	Belum	Belum	Belum	sudah	Belum	151,283,604,960	96,976,445,100	2,324,923,000	51,982,236,860	Belum
4	Kab. Pasaman Barat	Ya	sudah	sudah	dalam proses	dalam proses	sudah, sudah didapatkan data P3KE pemutakhiran 2024	sudah	sudah	Belum, verifikasi BNBA P#KE berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD	sudah	sudah		sudah, pelaporan terkendala bersamaan dengan cuti lebaran	sudah	sudah	202,896,400,294	126,616,860,015	10,035,217,429	66,244,322,850	Sudah
5	Kab. Limapuluh kota	Tidak	sudah, dijabat oleh Sekda	dalam proses	sudah	dalam proses	Belum	dalam proses	Belum	Belum, dalam proses verifikasi dan validasi nagari data P3KE 2023	Belum	Belum	Belum	sudah	sudah	Belum	24,869,951,970	18,315,056,350	1,560,377,920	4,994,517,700	Sudah
6	Kab. Tanah Datar	Tidak	sudah	dalam proses	sudah	dalam proses	dari 75 nagari, belum semuanya melakukan pemutakhiran data, jadi belum disampaikan ke P3KE	sudah	dalam proses	Belum	sudah	dalam proses	Belum	sudah	sudah	sudah	39.809.792.718	35.695.374.310	1.030.246.700	2.322.781.808	Sudah
7	Kab. Sijunjung	Tidak	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Belum	Belum	Belum	sudah	sudah	sudah	126,016,003,177	34,685,011,623	31,896,592,087	62,434,398,747	Belum

No	Kabupaten/kota	SK Tim TKPK Kabupaten/kota		Penyusunan Dokumen Kemiskinan			Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK	Tindaklanjut data P3KE 2023 okeh Kab/Kota			Tindaklanjut data P3KE 2024 okeh Kab/Kota			Pelaporan PPKE secara online TW I 2024	Update informasi perkembangan dokumen	Upload Dokumen kemiskinan	Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah				Pelaksanaan Rakor TKPK
		KDH dijabat Pj (Ya/Tidak)	SK Tim	RPKD	RAT 2024	LP2KD 2023		Verifikasi dan Validasi data P3KE BNBA	Penetapan SK oleh KDH	Disampaikan ke Provinsi	Penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024	Penetapan SK oleh Kepala Daerah	Disampaikan ke Provinsi				Total alokasi pagu (Rp)	Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran (Rp)	Strategi Meningkatkan Pendapatan (Rp)	Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Kab. Solok	Tidak	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah, sedang proses pemutakhiran desil 1	sudah	sudah	sudah	Dalam proses	Dalam proses, verifikasi dilakukan saat nagari sudah musnag dan proses penetapan menunggu musna nagai	Belum	sudah	Belum	sudah	176.831.433.693	985.653.099	97121123516	78724657078	sudah
9	Kab. Pesisir Selatan	Tidak	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dalam proses	Dalam proses	Belum	Sudah	Sudah	Sudah					sudah, bulan Agustus 2024
10	Kab. Kep. Mentawai																				
11	Kab. Solok Selatan	Tidak	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Sudah	Dalam proses	Belum	Sudah	Dalam proses	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	57.946.391.968	32.403.326.541	2.879.827.964	22663237463	Sudah
12	Kab. Dharmasraya	Tidak	Sudah	Belum	Sudah	Dalam proses	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dalam proses	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	89.382,571,523	66,508,623,400	3,489,562,350	19,384,385,773	Sudah
13	Kota Padang																				
14	Kota Bukittinggi	Tidak	Sudah	Sudah	Dalam proses	Dalam proses	Dalam proses	Belum	Belum	Belum	Dalam proses	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah					Belum, direncanakan bulan september 2024
15	Kota Payakumbuh	Ya	Sudah, Sekda sebagai ketua TKPK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dalam proses	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	116,005,975,979	4,360,795,310	59,257,545,222	52,387,635,447	akan dilaksanakan 26 juni 2024
16	Kota Solok	Ya	Sudah, periode SK adalah 2021-2025	Sudah	Sudah	Sudah	Dalam proses	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	61,578,413,504	37,891,607,541	1,633,178,200	22,053,627,763	Belum
17	Kota Sawahlunto	Ya	Dalam proses	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Dalam proses	Dalam proses	Belum	Dalam proses	Dalam proses	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	39.506,876,291	25,358,212,934	747,141,465	13,401,521,892	Sudah

LAMPIRAN
REKOMENDASI MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
KE KABUPATEN / KOTA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374

Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/ 197a /VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Pariaman

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Pariaman
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Pariaman pada tanggal 26 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Pariaman hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK, belum menyampaikan pelaksanaan tindaklanjut data P3KE 2023 ke Provinsi, belum melaksanakan tindaklanjut data P3KE 2024, belum melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024 pada website PPKE KemenkoPMK dan melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/ 195a /VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kabupaten Pasaman Barat

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 27 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023 ke provinsi, telah menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, dan telah melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023 ke Provinsi

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374 Padang

Padang, 18 Juni 2024

Nomor : 050/102/VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kabupaten 50 Kota

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten 50 Kot
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten 50 Kota pada tanggal 21 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kabupaten 50 Kota sebagai berikut ;
 - sedang menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 dan belum disampaikan ke Provinsi
 - belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023, sedang dilaksanakan verifikasi dan validasi data P3KE by name by address (BNBA); dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke provinsi
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2024, belum dilaksanakan penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024. Proses penetapan SK oleh Kepala Daerah belum dilakukan dan belum disampaikan ke provinsi
 - pelaporan PPKE secara online triwulan I Tahun 2024 sudah dilaksanakan.
 - untuk update informasi perkembangan dokumen kemiskinan kabupaten/kota belum dilakukan dan belum di-upload
 - belum dilaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen RPKD, RAT dan LP2KD dan disampaikan ke provinsi
 - b. Agar segera melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - c. Agar segera melaksanakan tindak lanjut data P3KE 2023 dan 2024
 - d. Agar segera melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Tembusan :
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/184/VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kabupaten Padang Pariaman

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

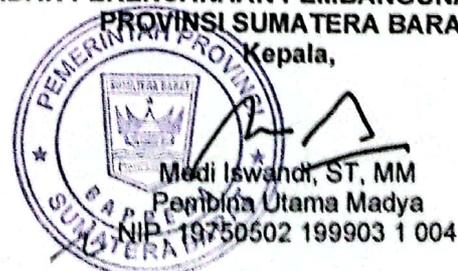
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kabupaten Padang Pariaman hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, belum melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024 pada website PPKE KemenkoPMK dan melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374 Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/182-VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Sawahlunto

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Sawahlunto
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Sawahlunto pada tanggal 25 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kota Sawahlunto sebagai berikut ;
 - sudah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023
 - belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023, saat ini sedang proses verifikasi dan validasi data P3KE by name by address (BNBA) dan proses penyusunan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke provinsi
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2024, saat ini dalam proses penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 serta proses penetapan SK oleh Kepala Daerah dan belum disampaikan ke provinsi
 - pelaporan PPKE secara online triwulan I Tahun 2024 sudah dilaksanakan.
 - untuk update informasi perkembangan dokumen kemiskinan kabupaten/kota sudah dilakukan dan sudah diupload
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar segera melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - b. Agar segera melaksanakan tindak lanjut data P3KE 2023 dan 2024

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374 Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/180/VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Payakumbuh

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Payakumbuh
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kota Payakumbuh sebagai berikut ;
 - sudah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023
 - sudah melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023, sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi data P3KE by name by address (BNBA); sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke provinsi
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2024, sudah dilaksanakan penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024. Saat ini sedang dalam proses penetapan SK oleh Kepala Daerah dan belum disampaikan ke provinsi.
 - pelaporan PPKE secara online triwulan I Tahun 2024 sudah dilaksanakan.
 - untuk update informasi perkembangan dokumen kemiskinan kabupaten/kota sudah dilakukan dan sudah diupload
 - belum dilaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar segera melaksanakan tindak lanjut data P3KE 2024
 - b. Agar segera melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :
1 Gubernur Sumatera Barat di Padang.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 3 Juli 2024

Nomor : 050/121/VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Salido

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyelesaikan penyusunan RPKD, LP2KD, dan RAT. Serta telah menetapkan SK TKPK oleh Bupati Pesisir Selatan
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat menyelesaikan RPKD, LP2KD, dan RAT tahun 2024 sesuai data pemutakhiran P3KE 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374 Padang

Padang, 28 Juni 2024

Nomor : 050/18/VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Solok

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Solok
di
Tempat

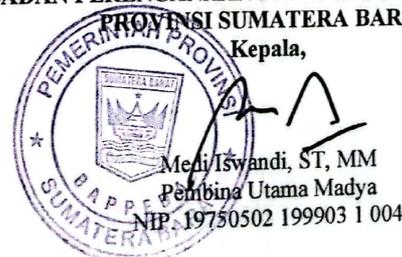
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Solok pada tanggal 24 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kota Solok sebagai berikut ;
 - sudah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023
 - belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023, sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi data P3KE by name by address (BNBA); sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke provinsi
 - untuk pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2024, belum dilaksanakan penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024. Proses penetapan SK oleh Kepala Daerah belum dilakukan dan belum disampaikan ke provinsi
 - pelaporan PPKE secara online triwulan I Tahun 2024 sudah dilaksanakan.
 - untuk update informasi perkembangan dokumen kemiskinan kabupaten/kota sudah dilakukan dan sudah diupload
 - belum dilaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar segera melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK
 - b. Agar segera melaksanakan tindak lanjut data P3KE 2024
 - c. Agar segera melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Nomor
Lampiran
Perihal

050/367/VII/Eko-SDA/Bappeda 2024
Rekomendasi Hasil Money Kembalikan
di Kabupaten Pasaman

Padang, 4 Juli 2024

Kepada Yth
Kepala Bappeda
Kabupaten Pasaman
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Juli 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, belum melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medriswandi, ST, MM

Pejabat Utama Madya

0750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 3 Juli 2024

Nomor : 050/ 195 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Sijunjung

Kepada Yth.

Kepala Bappeda
Kabupaten Sijunjung
di

Muaro Sijunjung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Sijunjung, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung belum menyesuaikan data P3KE BNBA tahun 2024 dengan data pemutakhiran P3KE BNBA tahun 2024 sehingga belum bias ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat menyesuaikan data P3KE BNBA tahun 2023 dengan data pemutakhiran P3KE BNBA tahun 2024 dan menetapkannya dengan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke Provinsi

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 3 Juli 2024

Nomor : 050/ 196 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Dharmasraya

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Dharmasraya, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan RPKD masih dalam proses, penyusunan LP2KD tahun 2023 masih dalam proses, penyesuaian dan P3KE BNBA tahun 2023 sesuai data pemutakhiran P3KE 2024 masih dalam proses.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat menyelesaikan RPKD, LP2KD tahun 2023 dan penyesuaian dan P3KE BNBA tahun 2023 sesuai data pemutakhiran P3KE 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang**

Padang, 3 Juli 2024

Nomor : 050/ 197 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Agam

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Agam
di

Lubuk Basung

Dengan hormat,

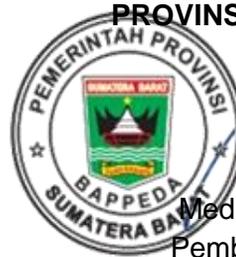
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Agam dalam penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan belum menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2024 serta belum melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2024.
 - b. Agar dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan waktu yang direncanakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,



Medi Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 4 Juli 2024

Nomor : 050/209 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Bukittinggi

Kepada Yth.
**Kepala BAPPELITBANGDA
Kota Bukittinggi**
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Bukittinggi pada tanggal 1 Juli 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 162 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, belum melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024 pada website PPKE KemenkoPMK dan melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

80
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Kepala,
Medi Iswandi, ST, MM
Plambina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 9 Juli 2024

Nomor : 050/223 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Solok

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Solok
di
Arosuka

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Juli 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Solok memasukan data PPKE pada aplikasi pada bulan Juni 2024, sedangkan data yang terimput setelah tanggal 28 Mei tidak bisa masuk pada aplikasi karna ada permasalahan pada system aplikasi.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat melakukan pengisian ulang data PPKE pada aplikasi.
 - Agar dapat menyesuaikan data P3KE BNBA Tahun 2023 dengan data pemutakhiran P3KE BNBA Tahun 2024 dan menetapkannya dengan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke Provinsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,
Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 9 Juli 2024

Nomor : 050/223/VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kabupaten Solok Selatan

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Solok Selatan
di
Kayu Aro

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok Selatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Juli 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke KemkoPMK.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat melaksanakan pemutakhiran P3KE 2024 ke MenmenkoPMK
 - Agar data P3KE 2023 yang sudah diverifikasi dan validasi segera ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke Provinsi
 - Agar data P3KE BNBA Tahun 2023 dengan data pemutakhiran P3KE BNBA Tahun 2024 yang telah disesuaikan segera ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan disampaikan ke Provinsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Medhi Swandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374

Padang

Padang, 3 Juli 2024

Nomor : 050/ 221 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kota Padang

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Padang
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kota Padang pada tanggal 28 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Padang hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum melaksanakan pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK, belum menyampaikan pelaksanaan tindaklanjut data P3KE 2023 ke Provinsi, belum melaksanakan tindaklanjut data P3KE 2024, belum melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



Ed. Isyandi, ST, MM
Pemula Utama Madya

NIP. 19760502 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 8 Juli 2024

Nomor : 050/ 225 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kabupaten Mentawai

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Mentawai
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten Mentawai pada tanggal 3-5 Juli 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Mentawai hingga saat ini dalam proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023, belum menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023 ke provinsi, belum sepenuhnya menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, dan belum melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - a. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - b. Agar dapat menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024 pada website PPKE KemenkoPMK dan melakukan upload dokumen kemiskinan melalui link yang disediakan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023.
 - d. Agar dapat menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut data P3KE 2023 ke Provinsi

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Medi Iswandi, ST, MM
Bendahara Utama Madya
NIP. 19760502 199903 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 24 Juni 2024

Nomor : 050/184a/VII/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Monev. Penanggulangan
Kemiskinan ke Kota Padang Panjang

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menetapkan SK Tim TKPKD yang di jabat oleh PJ sebagai Ketua TKPK, dalam penyusunan RPKD dan RAT masih dalam proses, penyusunan LP2KD tahun 2023 sudah selesai di buat dan sudah diserahkan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan Pemutakhiran Dat P3KE sudah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan, Triwulan 1 (identifikasi Awal Data P3KE), dan sedang proses pelaporan triwulan 2 (Sinkronisasi Desil kemiskinan). Total anggaran yang dialokasikan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp. 27.695.235.226.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat menyelesaikan penyusunan RPKD dan RAT , dan segera melaporkan hasil Pelaporan Triwulan II (Sinkronisasi Desil kemiskinan).

- Agar mempercepat penyusunan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
- Untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Kepala,


Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No, 01 Telp. 7054555 – 7055627 – 7054374
Padang

Padang, 24 Juni 2024

Nomor : 050/ 185a /VI/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Monev Kemiskinan
di Kabupaten Tanah Datar

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Datar
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ke Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27 Juni 2024, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi, mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Bupati/Walikota.
2. Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 serta masih dalam proses penyusunan RPKD sampai dengan BAB IV, belum menyampaikan pelaksanaan tindaklanjut data P3KE 2023 ke provinsi, telah menyampaikan laporan PPKE triwulan I 2024, dan telah melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi berikut :
 - Agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), penetapan SK Kepala Daerah tentang pelaksanaan tindaklanjut data P2KE tahun 2024 dan menyampaikan ke Provinsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan Yth :
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.